IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI PADA MATA PELAJARAN PPKn DI SMA NEGERI 1 TIKEP KABUPATEN MUNA BARAT

Oleh:

Wa Ode Titi Ismawati

(Mahasiswa S1 Jurusan PPKn FKIP UHO)

Karsadi

(Dosen Jurusan PPKn FKIP UHO)

Samiruddin T

(Dosen Jurusan PPKn FKIP UHO)

*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kendari,
93232 Sulawesi Tenggara, Indonesia*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) implementasi nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Tikep, (2) faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Tikep, (3) upaya mengatasi faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Tikep. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tikep Kabupaten Muna Barat pada bulan Agustus sampai November Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala SMA Negeri 1 Tikep, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Wali Kelas XI IIS³, 5 orang Guru, 2 orang Tata Usaha, dan 9 orang siswa kelas XI IIS³. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan 3 cara yakni observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Tikep dilaksanakan pada 6 tahapan inkuiri. Nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan yaitu kebebasan, hak-hak individu, tujuan bersama, keadilan, patriotisme, toleransi, percaya diri, saling menghormati dan menghargai. Faktor pendukung implementasi nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kemauan serta motivasi belajar siswa, kekritisian siswa, dan menghargai hak individu. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya jam belajar PPKn, kurangnya media pembelajaran, dan kurangnya rasa tanggung jawab siswa dalam belajar. Upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut adalah jam belajar PPKn ditambah, pengadaan berbagai media pembelajaran, serta adanya tingkat kesadaran siswa atas tanggung jawab yang dimilikinya, terutama dalam belajar. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu nilai-nilai demokrasi berupa kebebasan, hak-hak individu, tujuan bersama, keadilan, patriotisme, toleransi, percaya diri, serta sikap saling menghormati dan menghargai telah diimplementasikan melalui pelaksanaan model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn, meskipun masih terdapat beberapa hambatan.

Kata kunci: *Nilai-Nilai Demokrasi, Model Pembelajaran Inkuiri, Mata Pelajaran PPKn*

PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Satu hal pokok yang menjadi perhatian dalam pasal ini yaitu berkembangnya peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis. Untuk menciptakan warga negara yang demokratis, tentu memerlukan peran serta sekolah, sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Sekolah, layaknya sebuah negara dalam lingkup yang lebih kecil, dimana siswa dapat belajar di dalamnya terutama memahami dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Zamroni (2013), bahwa belajar demokrasi dimulai dari sekolah, kemudian berlanjut pada masyarakat lewat keterlibatan dan aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, serta pandangan kritis terhadap apa yang berlangsung dan informasi yang berkembang di masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai demokrasi, tentunya siswa diharapkan akan menjadi warga negara yang demokratis.

Dalam menciptakan warga negara yang demokratis, bergantung pada bagaimana cara ataupun peran serta para pemangku pendidikan terutama guru dalam melaksanakan pembelajaran agar dapat melaksanakan pembelajaran yang demokratis. Berkaitan dengan ini, Sudaryanto (2012), mengemukakan bahwa demokratisasi belajar berisi pengakuan hak-hak anak melakukan tindakan belajar sesuai dengan karakteristiknya. Dalam hal ini, sekolah memiliki posisi strategis untuk mengembanguaskan potensi siswanya. Biarkanlah siswa-siswa kita berkembang, kreatif, dan aktif, sementara para guru cukup mengarahkannya ke arah yang baik dan benar.

Salah satu mata pelajaran di sekolah yang relevan dan memiliki peran dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi bagi siswa yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn merupakan mata pelajaran wajib di sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi baik yang berstatus Negeri maupun Swasta. Menurut C.S.T. Kansil (1995), bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Jika sejatinya pembelajaran PPKn selalu dilakukan dengan menggunakan paradigma lama, dimana guru memberikan pengetahuan kepada siswa yang pasif, dimana guru mengajar dengan metode konvensional yaitu metode ceramah dengan mengharapakan siswa duduk, diam, dengar, catat dan hafal. Sehingga proses pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik perhatian siswa. Namun, kini dengan berkembangnya zaman dan dengan adanya pelatihan guru yang rutin dilakukan, maka ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran dapat menarik perhatian dan minat belajar siswa, agar siswa mampu untuk berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Salah satunya yaitu dengan menerapkan beragam model pembelajaran, agar pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Melalui pengembangan beragam model pembelajaran ini pula, nilai-nilai demokrasi pada siswa semakin dapat ditingkatkan.

Menurut Soewarno Handyaningrat (1992) pelaksanaan atau implementasi adalah usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan

dengan kesadarannya atau berpedoman pada perencanaan dan dengan usaha pengorganisasiannya. Bardach (1997), mengemukakan batasan pengertian implementasi sebagai berikut: 1) proses penyusunan unsur-unsur spesifik yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu program; 2) memainkan jumlah peran yang saling berhubungan dimana diambil unsur-unsur yang ada atau diberikan dalam proses penyusunan program secara khusus.

Teori Belajar

Menurut Arief Sadiman (2011), belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang yang berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat. Burton dalam sebuah buku "*The Guidance of Learning Activities*", merumuskan pengertian belajar sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam buku *Educational Psychology*, H.C. Witherington, mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian, atau suatu pengertian (Aunurrahman, 2009).

Menurut Johni Dimiyati (2016), belajar adalah proses yang harus dilakukan oleh peserta didik dan ditandai oleh adanya perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, indikasi seseorang yang telah melakukan kegiatan belajar, pada diri seorang pelajar akan terjadi adanya perubahan pada ketiga ranah tersebut.

Teori Pembelajaran

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Johni Dimiyati (2016), menyatakan bahwa proses pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi antara guru (pendidik) dan murid (peserta didik). Kualitas hubungan antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran sebagian besar ditentukan oleh pribadi pendidik dalam kegiatan mengajarnya (*teaching*) dan peserta didik dalam belajar (*learning*). Hubungan tersebut mempengaruhi kesediaan peserta didik untuk melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran.

Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat (Winataputra., dkk. 2012). Warga negara yang dimaksudkan ialah siswa. Artinya bahwa setiap siswa dimanapun berada akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang telah diajarkan di sekolah baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Siswa harus mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi agar dapat menjadi warga negara yang baik. Dengan menjadi warga negara yang baik, maka tercapailah cita-cita suatu bangsa. Menurut *Wikipedia, the free encyclopedia* sebagaimana dikutip oleh Zamroni (2013), bahwa pendidikan demokrasi merupakan suatu teori pembelajaran dan pengelolaan sekolah yang memberikan kesempatan bagi siswa dan guru serta staf administrasi untuk berpartisipasi secara bebas dan setara dalam kegiatan sekolah. Sedangkan menurut Zamroni sendiri (2013), bahwa pada prinsipnya, pendidikan demokrasi adalah

suatu proses, dimana peserta didik berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan sekolah.

Nilai-Nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi menurut Zamroni (2013), antara lain kebebasan, hak-hak individu, tujuan bersama, keadilan dan patriotisme. Sebagai salah satu nilai demokrasi, kesadaran akan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat perlu untuk ditanamkan pada diri setiap siswa. Sudah barang tentu kesadaran itu terkait dengan materi pembelajaran yang terdapat di berbagai mata pelajaran tertentu, tetapi lebih penting dari pada itu, kesadaran akan keadilan sangat terkait dengan perilaku bagaimana guru melaksanakan pembelajaran. Pendidik atau guru senantiasa harus melaksanakan pembelajaran yang mampu mencerahkan dan membangkitkan keingintahuan dan semangat siswa untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pengembangan potensi yang dimiliki secara optimal dan pengembangan kebebasan yang mereka miliki.

Model Pembelajaran Inkuiri

Model pembelajaran inkuiri merupakan pembelajaran dengan seni merekayasa situasi-situasi yang sedemikian rupa sehingga siswa bisa berperan sebagai ilmuwan. Siswa diajak untuk bisa memiliki inisiatif untuk mengamati dan menanyakan gejala alam, mengajukan penjelasan-penjelasan tentang apa yang mereka lihat, merancang dan melakukan pengujian untuk menunjang atau menentang teori-teori mereka, menganalisis data, menarik kesimpulan dari data eksperimen, merancang dan membangun model (Imas Kurniasih dan Berlin Sani, 2015).

Menurut Dimiyati (2016), bahwa model pembelajaran inkuiri menerangkan pembelajaran pada proses berpikir secara kritis, logis, dan analitis. Pembelajaran model ini menekankan strategi heuristik (dari bahasa Yunani yang berarti saya menemukan), jadi kepada siswalah pembelajaran lebih banyak melakukan kegiatan untuk menemukan sesuatu. Jadi, model ini menekankan keaktifan pada siswa.

Adapun langkah-langkah (sintak) model pembelajaran inkuiri menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani (2015), adalah melakukan orientasi, belajar merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan.

Pembelajaran PPKn

Menurut Momahammad Nuh melalui kata pengatarnya pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), menyatakan bahwa melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup empat pilar kebangsaan yang terkait satu sama lain, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pembelajaran PPKn sebagai salah satu program pendidikan yang membina dan menyiapkan siswa sebagai warga negara yang baik dan sebagai anggota masyarakat yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga peserta didik mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan dalam melakoni kehidupan di masyarakat. Mata pelajaran PPKn diharapkan dapat menjadi wahana pendidikan demokrasi yang lebih substansial, dalam arti *learning democracy, in democracy, and for democracy* tanpa harus

meninggalkan karakteristik utamanya sebagai upaya *nation and character building*, (Winataputra dalam Wayan Kertih, 2015).

Materi Mata Pelajaran PPKn

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (C.S.T. Kansil, 1995).

Menurut Winarno (2014), menyatakan bahwa materi pelajaran atau bahan ajar (*instructional materials*) secara garis besar terdiri atas pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci materi pembelajaran terdiri atas materi yang bersifat pengetahuan (fakta, konsep, preposisi, prinsip, teori), materi bersifat keterampilan (tata cara, prosedur), dan materi yang bersifat nilai.

Guru PPKn kelas XI di SMA Negeri 1 Tikep menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu model pembelajaran inkuiri sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Selain itu, dalam penerapan model pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi sehingga siswa dapat memahami nilai-nilai demokrasi dan dapat bertindak serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga dengan demikian kehidupan yang demokratis di kalangan siswa pun dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tikep, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat dengan alasan bahwa guru PPKn kelas XI SMA Negeri 1 Tikep menggunakan model pembelajaran inkuiri sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan semangat belajar siswa, yang mana dalam penerapan model pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi sehingga siswa dapat memahami nilai-nilai demokrasi dan dapat bertindak serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Wali Kelas XI IIS³, 5 orang guru, 2 orang Tata Usaha, dan 9 orang siswa kelas XI IIS³. Teknik pengumpulan data, yaitu 1) penelitian kepustakaan (*library research*) dan 2) penelitian lapangan (*field research*) yang terdiri dari observasi (*observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*) dan dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengolah data, menggolongkan data sesuai kategori kemudian dihubungkan dengan keterkaitan konsep atau teori yang ada dan diinterpretasikan dengan melihat fakta yang terjadi mengenai implementasi nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn, faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi, dan upaya dalam mengatasi faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi. Sehingga ditarik suatu kesimpulan yang menggambarkan tentang implementasi nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Tikep Kabupaten Muna Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Model Pembelajaran Inkuiri pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Tikep

Nilai-nilai demokrasi menurut Zamroni (2013), yaitu kebebasan, hak-hak individu, tujuan bersama, keadilan dan patriotisme. Sebagai salah satu nilai demokrasi, kesadaran akan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat perlu untuk ditanamkan pada diri setiap siswa. Sudah barang tentu kesadaran itu terkait dengan perilaku bagaimana guru melaksanakan pembelajaran. Pendidik atau guru senantiasa harus melaksanakan pembelajaran yang mampu mencerahkan dan membangkitkan keingintahuan dan semangat siswa untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pengembangan potensi yang dimiliki secara optimal dan pengembangan kebebasan yang mereka miliki.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Tikep dilakukan berdasarkan pada setiap tahapan model pembelajaran inkuiri, yakni mulai dari tahap melakukan orientasi sampai pada tahap merumuskan kesimpulan.

Adapun nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan oleh siswa melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn adalah nilai kebebasan, hak-hak individu, tujuan bersama, keadilan, patriotisme, toleransi, percaya diri, serta saling menghormati dan menghargai. Melalui implementasi nilai-nilai demokrasi ini, kehidupan yang demokratis di kalangan siswa menjadi terwujud.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Model Pembelajaran Inkuiri pada Mata Pelajaran PPKn SMA Negeri 1 Tikep

1. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, tentu akan memiliki suatu hal baik yang menjadi penunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran tersebut. Pada pelaksanaan pembelajaran PPKn, tentu memiliki faktor-faktor yang menjadi pendukung jalannya pembelajaran agar menjadi maksimal. Begitupun dalam pengimplementasian nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Tikep. Faktor pendukung adalah setiap hal yang dapat mempengaruhi sesuatu menjadi lebih baik dan menjadi berkembang. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn berdasarkan hasil penelitian yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kemauan serta motivasi belajar siswa, kekritisan siswa dan menghargai hak individu.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn yaitu kurangnya jam belajar PPKn, kurangnya media pembelajaran, dan kurangnya rasa tanggung jawab siswa.

C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Model Pembelajaran Inkuiri pada Mata Pelajaran PPKn SMA Negeri 1 Tikep

Adanya beberapa hambatan dalam implementasi nilai-nilai demokrasi, bukan berarti bahwa beragam hambatan tersebut tidak dapat diatasi dengan berbagai upaya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan implementasi nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Tikep meliputi 1) jam belajar PPKn ditambah, 2) pengadaan berbagai media pembelajaran, dan 3) adanya kesadaran siswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai demokrasi berupa kebebasan, hak-hak individu, tujuan bersama, keadilan, patriotisme, toleransi, percaya diri, serta sikap saling menghormati dan menghargai telah diimplementasikan melalui pelaksanaan model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Tikep, meskipun masih terdapat beberapa hambatan.

Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai implementasi nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Tikep, maka peneliti memberikan saran berupa:

1. Bagi siswa SMA Negeri 1 Tikep agar senantiasa berbuat dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, bukan hanya pada proses pembelajaran, tetapi dalam pergaulan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat sehingga dapat tercipta kehidupan yang demokratis sejak dini.
2. Bagi guru mata pelajaran PPKn maupun guru lainnya, harus senantiasa memberikan keteladanan bagi siswa karena guru merupakan centra atau ujung tombak dalam penanaman nilai-nilai demokrasi. selain itu pula, guru hendaknya dapat menguasai beragam model pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan lebih bermakna bagi siswa, sehingga siswa tidak memiliki rasa bosan dalam belajar.
3. Bagi sekolah agar dalam melaksanakan atau menjalankan suatu kebijakan selalu berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi. Karena sekolah layaknya sebuah negara dalam lingkup kecil yang dapat mengajarkan setiap warga sekolah untuk berbuat dan berperilaku berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, sehingga kehidupan yang demokratis dapat dimulai dari lingkungan yang kecil yaitu sekolah, sehingga nantinya siswa maupun warga sekolah lainnya dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aunurrahman. 2009. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Dimiyati, Johni. 2016. *Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Handyaningrat, Soewarno. 1982. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kansil, C.S.T. 1995. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tengah Tahun Pertama SMU Kelas 2 (2A)*. Jakarta: Erlangga.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kertih, I Wayan. 2015. *Perangkat Pembelajaran PPKn Perencanaan dan Pengembangan*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Kurniasih, Imas dan Berlin Sani. 2015. *Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Meningkatkan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Kata Pena.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Sudaryanto. 2012. *Guru Bukan Tukang Mengajar*. Yogyakarta: Pedagogia.
- Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada.
- Winarno. 2014. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, Udin.S.,dkk. 2012. *Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Ombak.